

The Role Of Tourism And Culture Department In The Development Of Bandengan Beach Tourist Area In Jepara Regency

Bima¹,

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Mar 12th, 2018
 Accepted Mei 26th, 2018
 Published Jul 15th, 2018

Keyword:

Role; Tourism Development; Community Empowerment.

Abstract

Tourism development is directed in the role of social and economic activities, to create jobs, to increase community's incomes, as well as local revenues. The development of facilities and infrastructure as a support in the development of tourism destinations need to be balanced with the empowerment of local people around the tourist area. Therefore, the development of tourist areas is needed. The purpose of this study is to know the role, socio-economic impact and constraints of Tourism and Culture Department in the development of Bandengan Beach tourist area. The research method is qualitative. The focus of the research is the role, socio-economic impact and constraints of the Tourism and Culture Department in the development of Bandengan Beach tourist area. Source of data were obtained from interviews, documentation, and observation. Data validity was tested by triangulation technique. Data were analyzed interactively through the steps of data collection, data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The Hierarchy Process Analysis Method of determining priority development of tourist areas used with the application of expert choice. The research results show that the role of Tourism and Culture Department in the development of Bandengan beach tourist area by means of human resource development, tourism product development, market development and marketing, also institutional development. Socio-economic impacts on people's lives. Social impacts include people's mindset, community behavior and self-confidence. The impact of the economic changes experienced is the increase in income. The constraints experienced by the Department of Tourism and Culture in the development of Bandengan beach tourist area are internal and external constraints. This internal obstacle are the limited budget and still lack expertise while external constraint comes from low level of public awareness.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Last name, first name, & last name 2, first name 2. (Year). Title of manuscript. *Unnes Political Science Journal*

PENDAHULUAN

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: bimachisnariana@gmail.com

Pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi sangat wajar dikarenakan daerah wisata menjadi pilihan utama wisatawan lokal maupun manca negara. Bahkan pada era globalisasi saat ini, daerah wisata telah berkembang pesat menjadi primadona wisatawan meski hanya untuk sekedar menghabiskan waktu luang.

Upaya pembangunan daerah wisata sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1978. Hal itu dituangkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas anatara lain untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.

Menurut Liu (dalam Pitana dan Diarta 2009:114) kerangka implementasi kebijakan pariwisata paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu: pembangunan dan pengembangan infrastruktur; aktivitas pemasaran; pengembangan kualitas budaya dan lingkungan; pengembangan sumber daya manusia. Secara lebih luas Liu menjabarkan dalam mengembangkan sumber daya manusia disediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggaraan pariwisata termasuk sertifikasi dan program pelatihan, serta teknologi dan skill. Pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa.

Pantai Bandengan yang mempunyai daya tarik wisata berupa Pantai pasir putih dengan kelandaian pantai yang relatif datar, air laut yang masih jernih dengan ombak yang tidak terlalu besar sangat cocok digunakan untuk berenang atau mandi laut dan sangat cocok untuk olahraga laut, keindahan matahari terbenam yang merupakan pemandangan yang sangat indah di sore hari. Meskipun Pantai Bandengan memiliki potensi yang besar sebagai

daerah tujuan wisata, akan tetapi pada kenyataannya Pantai Bandengan masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang dapat menghambat dalam pengembangan destinasi pariwisata. Masih rendahnya sarana promosi wisata sehingga tidak terjadinya peningkatan pengunjung yang signifikan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum dapat mengakomodir semua kepentingan wisatawan karena masih terbatasnya fasilitas penunjang yang ada. Disisi lain juga kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga maupun melindungi wisata yang berpengaruh pada keberlanjutan kelestarian lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Jane Richie (Moleong, 2009:6) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan daerah wisata Pantai Bandengan yang berada di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Fokus penelitian ini meliputi (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara; (2) Dampak sosial ekonomi masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan setelah adanya pengembangan daerah wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; (3) Kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengandi Kabupaten Jepara. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni informan penelitian dan data sekunder yakni berupa dokumen. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verivikasi. Metode Analisis Hirarki Proses untuk menentukan prioritas pengembangan daerah wisata yang digunakan dengan aplikasi expert choice. Informan dalam penelitian ini antara lain Dinas Priwisata dan Kebudayaan, masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan dan wisatawan daerah wisata Pantai Bandengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pariwisata yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pariwisata, visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mewujudkan daerah wisata yang maju dengan bertumpu pada potensi budaya lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menentukan kebijakan pengembangan daerah wisata terlebih dahulu membangun kerangka operasional yang tersusun dalam Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) dimana sektor publik dan sektor swasta terlibat, menyediakan dan membangun infrastruktur darat dan laut dengan kelengkapan sarana prasarana serta membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Konsep pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertumpu pada keberlanjutan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran dan pengembangan kelembagaan. Strategi tersebut merupakan solusi akan tantangan, peluang serta kebutuhan yang terdapat di lingkungan daerah wisata Pantai Bandengan.

Pertama, pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata. Proses pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pelatihan dan pendidikan masyarakat daerah wisata mengenai standar pelayanan prima, manajemen atau pengelolaan usaha, guiding, pelatihan bahasa inggris, studi banding, pengelolaan homestay, pembuatan souvenir berbahan baku lokal, pengelolaan makanan khas sebagai oleh-oleh, serta kepekaan masyarakat mengidentifikasi peluang bidang usaha pariwisata.

Kedua, pengembangan produk wisata dengan cara pembangunan sarana dan prasarana serta penataan kios-kios baik makanan maupun cendramata, pengembangan produk wisata tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana tetapi adanya event-event yang digelar dapat dinikmati para wisatawan, dalam hal ini membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bandengan.

Ketiga, pengembangan pasar pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meningkatkan perluasan distribusi informasi pemasaran melalui teknologi informasi. Pemanfaatan media massa dan lembaga atau institusi daerah untuk image building. Dalam

rangka pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan pengembangan pasar dan pemasaran sebagai strategi utama untuk memperkenalkan wisatawan tentang Pantai Bandengan dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan banyak nya wisatawan yang berkunjung.

Keempat, pengembangan kelembagaan dengan penguatan organisasi kelembagaan pada tiap usaha pelayanan wisata dikemas dalam pembentukan kelompok sadar wisata pada masyarakat sekitar daerah wisata Pantai Bandengan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mereka dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, maupun pemeliharaan keberlanjutan daerah wisata Pantai Bandengan.

Pada intinya pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan mencakup beberapa komponen utama yaitu dengan adanya Obyek dan Daya Tarik (attractions), Aksesibilitas (accessibility), Amenitas (amenities), Fasilitas pendukung (ancillary services), Kelembagaan (institutions) dengan menyentuh pembangunan dan pengembangan infrastruktur, aktivitas pemasaran, pengembangan kualitas budaya dan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan sendiri selalu berpijak pada pengembangan wilayah dan masyarakat daerah wisata.

Dalam kerangka optimalisasi manfaat pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat daerah wisata sebagaimana tercermin dalam salah satu prinsip kepariwisataan yang berlanjut, dalam pembangunan kepariwisataan dikenal dengan strategi perencanaan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat atau pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini tentunya dalam pengembangan pariwisata tidak pernah lepaas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun nonfisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus di pandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekan pada masyarakat lokal. Dalam penyelenggaraannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu mengedepankan kebermanfaatan dan keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutannya , oleh sebab itu pengembangan pariwisata daerah wisata dalam

pengembangan sumber daya manusia tidak boleh menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada saat masyarakat akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses pembangunan.

Pada dasarnya ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam rangka pembangunan program penguatan usaha ekonomi dan perluasan kesempatan kerja masyarakat di destinasi, diantara lain adalah sebagai berikut: Kualitas produk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, produk souvenir, produk atraksi dan daya tarik, produk akomodasi, kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah dari masyarakat setempat. Kedua organisasi atau lembaga usaha pariwisata keseluruhan program penguatan segenap usaha kerajinan ataupun makanan yang memproduksi maupun menjadi penyalur dan juga lembaga yang terkait dalam pengelolaan produk wisata setempat. Promosi dan distribusi program peningkatan kualitas promosi dan distribusi dari semua produk wisata yang dihasilkan oleh segenap usaha pariwisata setempat kepada pasar wisata yang ada. Dukungan alat produksi: semua program yang terkait dengan penyediaan semua peralatan yang bisa mendukung dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan segenap produksi wisata yang ada di destinasi tersebut.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pariwisata berbasis meliputi dimensi ekonomi; berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan dimensi sosial; meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta , memperkuat organisasi komunitas.

Kegiatan pariwisata berbasis masyarakat membawa berbagai dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat; dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan sosial, dampak terhadap pola pembagian kerja, serta dampak interaksi sosial.

Pada hakekatnya peran serta masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan daerah wisata. Namun banyak situasi yang memungkinkan masyarakat tidak dapat mengoptimalkan daya dukung yang telah diberikan, karena adanya sebab-sebab yang

mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa semua kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan mereka.

Dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kendala yang di sebabkan dua faktor yakni kendala yang berasal dari Dinas Pariwisata dan kendala yang berasal dari masyarakat atau kendala eksternal. Kendala internal dengan terbatasnya anggaran karena pengembangan daerah wisata tidak hanya di lakukan di daerah wisata Pantai Bandengan saja. Selain itu juga terbatasnya tenaga ahli, pada kualitas dan kuantitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pariwisata.

Sedangkan kendala eksternal kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam pengembangan wisata Pantai Bandengan. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan mereka. Selain itu juga penangkapan masyarakat yang berbeda, setelah kegiatan dilakukan ada yang mengaplikasikannya ada juga yang tidak. Dari empat kendala yang ditemui di lapangan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor dan latar belakang dari berbagai kendala yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitaian pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengembangan daerah wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni melalui pengembangan sumber daya manusia pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan dengan membentuk kelompok sadar wisata obyek wisata Pantai Bandengan.
2. Pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan membawa dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan. Dampak sosial tersebut meliputi pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. Sedangkan dampak ekonomi yang dialami adalah meningkatnya pendapatan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan.

3. Kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ini berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan kendala eksternal dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan.

Saran yang dapat di berikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah Pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan hendaknya dimulai pembenahan dari segi internal terlebih dahulu seperti peningkatan obyek dan daya tarik (atraksi), aksesibilitas, amenities, fasilitas penunjang dan kelembagaan setelah itu baru segi eksternal berupa pasar dan pemasaran. Masyarakat diharapkan meningkatkan image promotion sebagai tuan rumah serta mampu menjaga dan meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan daerah wisata Pantai Bandengan. peningkatan kesadaran masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan yaitu dengan memberikan kepastian manfaat yang akan di dapatkan masyarakat dengan pengembangan daerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978
Tentang Garis-Garis Haluan Negara
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Purwoko. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Prespektif Kebijakan Publik. Bamdung: Alfabeta
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta:
Andi.
- Pitana, I Gede dan Gayatri Putu G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi
- Prasetyo, Putro. (2013). Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota tarakan.ejurnal Ilmu Pemerintahan.
Volume 1. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman
- Sunaryo, Bambang. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia. Yoyakarta: Gava Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.